

## Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua

Yuniar Sri Hartati\*

\*Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Diterima 28 Juli 2022 Disetujui 30 Juli 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Ketimpangan Pengeluaran Gini Ratio Ekonomi Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah</p>	<p><b>Abstract :</b> This study was conducted with the aim of measuring and analyzing the analysis of Economic inequality in Papua Province. This study first calculates Inequality by using the Gini Ratio approach (Gini Coefficient). This study uses the economic variables of Expenditure Distribution for the Lowest 40% Urban Group and Expenditure Distribution for the Lowest 40% Rural Group. This study explains that during the last 5 years (2017-2021) the highest inequality rate occurred in 2017 and 2018 of 0.398 (medium), while the highest Urban Gini Ratio in 2017 was 0.322 and the highest Rural Gini Ratio in 2021 was 0.422. For the highest distribution of expenditure in the lowest 40% urban group in 2021 at 21.65 and the highest expenditure in the lowest 40% rural group in 2018 at 16.00</p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis analisis ketimpangan Ekonomi di Provinsi Papua. Penelitian ini terlebih dahulu menghitung Ketimpangan dengan menggunakan pendekatan <i>Gini Ratio</i> (Koefisien Gini). Penelitian ini menggunakan variabel ekonomi Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan dan Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0.398 (sedang), sedangkan untuk <i>Gini Ratio</i> Perkotaan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,322 dan <i>Gini Ratio</i> Perdesaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,422. Untuk Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 21,65 dan Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16,00.</p>

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Alamat Korespondensi :

Yuniar Sri Hartati,  
Ekonomi Pembangunan,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura  
Jl.Beringin Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura - Papua  
E-Mail : [tanthi\\_soelarso@yahoo.com](mailto:tanthi_soelarso@yahoo.com)

### PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, salah satu caranya dengan pembangunan ekonomi yang baik. Secara konsep, ukuran dari tingkat kesejahteraan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi tersebut yaitu pendapatan perkapita yang merupakan perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. Bagaimana menemukan suatu titik temu diantara upaya dalam meningkatkan pendapatan perkapita dengan pertumbuhan ekonomi dan disisi lain mengupayakan pemerataan pertumbuhan antar wilayah (Nurhayani, dkk., 2015).

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumber daya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk

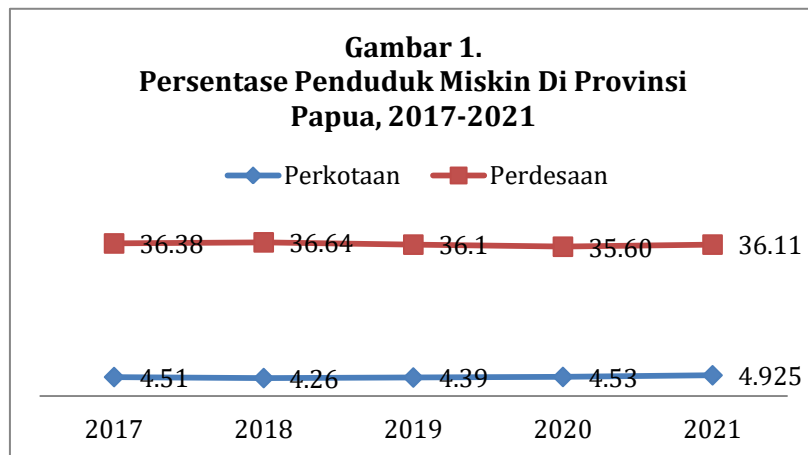
menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah. Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil.

Menurut Adisasmita (2013:112) terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah tersebut mencerminkan perbedaan dalam tingkat kemajuan dari berbagai daerah, dengan kata lain hal tersebut merupakan ketimpangan atau disparitas antar daerah. Kesenjangan antar daerah terjadi dimana-mana dan sudah menjadi fenomena umum, yang cenderung di banyak negara menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan (Adisasmita, 2013:112).

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, ketimpangan menjadi fenomena yang umum terjadi. Salah satu contoh adalah Provinsi Papua, dimana terdapatnya perbedaan dan tidak meratanya aspek penunjang ekonomi antara lain tidak meratanya distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

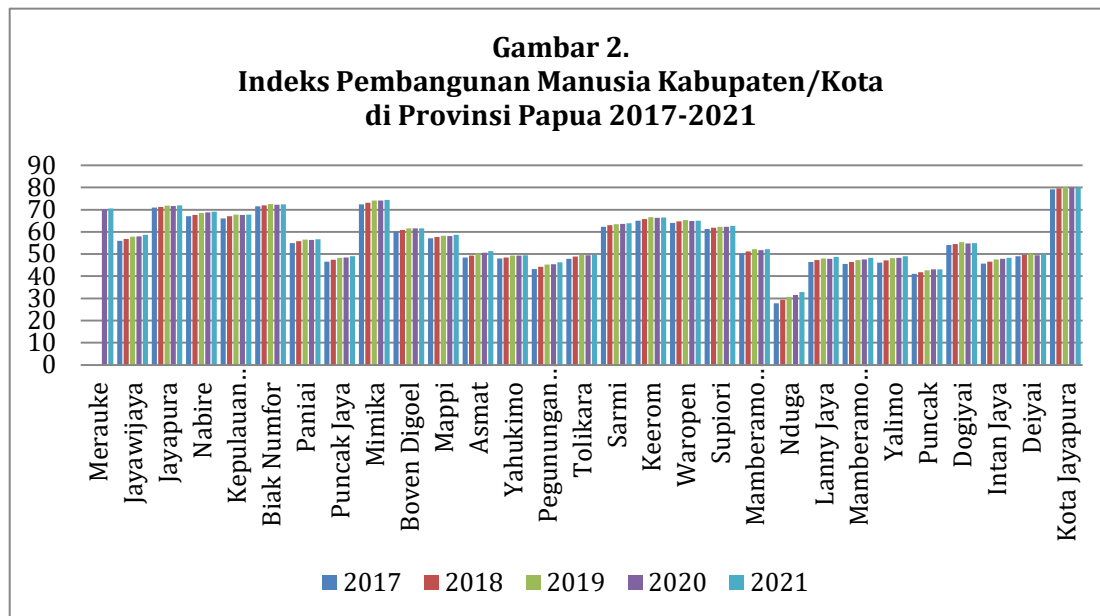
Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang serius untuk ditanggulangi dan umum terjadi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketimpangan juga memiliki dampak positif yaitu mendorong daerah lain yang kurang maju dan berkembang. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dan alokasi dana pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan yang terjadi akan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana berdampak pula pada tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua cenderung meningkat.



Sumber: Data BPS Provinsi Papua, 2022

Ketimpangan pembangunan juga terjadi karena ketidakmerataan aspek ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Provinsi Papua dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terlihat adanya peningkatan secara berkelanjutan pada setiap kabupaten/kota. Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia ini tentunya tidak merata pada setiap wilayah karena perbedaan kondisi demografis.



Sumber: Data BPS Provinsi Papua, 2022

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Ketimpang Ekonomi di Provinsi Papua”.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua.

## PEMBATASAN MASALAH

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Papua dengan variable penelitian adalah Koefesien/Indeks Gini Ratio baik secara umum di Provinsi Papua maupun pada wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat pengeluaran penduduk, Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Prov. Papua maupun pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

Data yang digunakan adalah data dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang sudah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

## LANDASAN TEORI

### 1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah aspek yang umum terjadi di dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat di masing-masing daerah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan daerah juga menjadi berbeda. Menurut Myrdal (1957), dalam perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009:23) yaitu :

- a) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti: minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Berbeda halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

- b) Perbedaan Kondisi Demografi Perbedaan kondisi demografi dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah dikarenakan hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan persediaan lapangan kerja yang potensial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang baik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. kondisi demografi juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah transmigrasi atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi di suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung meningkat, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas di dalam suatu daerah, seperti : jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.
- d) Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat naik. Apabila konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, pemerataan fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara. Ketiga, kondisi demografi juga turut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.
- e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah Alokasi dana bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antardaerah cenderung meningkat. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih menurun. Keuntungan alokasi ditentukan dari biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan penyewaan tanah. Oleh karena itu investasi akan lebih cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

## 2. Pengeluaran Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan pangsa pengeluaran pangan yang semakin kecil. Konsumsi protein masyarakat sudah melebihi dari yang dianjurkan, sebaliknya untuk konsumsi protein. Pola konsumsi pangan masyarakat sudah semakin beragam dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin besar. Namun untuk menuju pola pangan PPH, konsumsi beras harus dikurangi, sebaliknya untuk umbi-umbian, pangan hewani dan sayur dan buah masih perlu ditingkatkan secara signifikan (Ariani, 2010).

Pangan pokok sebagai sumber karbohidrat berasal dari jenis padi-padian dan umbi-umbian. Jenis yang dikonsumsi adalah beras, jagung, ketela rambat, singkong dan kentang. Jenis pangan pokok ini sangat mudah ditemui dan dijual di pasar-pasar tradisional.

Hasil penelitian Wida R (2015) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran sebesar 65,32 % dan proporsi pengeluaran non pangan terhadap total pengeluaran sebesar 34,68 %. Proporsi pengeluaran pangan yang lebih besar daripada proporsi pengeluaran untuk konsumsi non pangan menunjukkan bahwa dalam kondisi keterbatasan pendapatan pemenuhan kebutuhan makanan diutamakan daripada kebutuhan lain. Pangan pokok rumah tangga pra sejahtera sebesar 75,56% mengkonsumsi beras dan 12,22 % mengkonsumsi nasi jagung.

Kebiasaan makan masyarakat dipengaruhi oleh cara mendapatkan sumber pangan, pemilihan bahan makanan, penyusunan menu makan sehari-hari, pengolahan dan penyajian makanan, pendistribusian makanan, frekuensi makan sehari-hari, tabu makanan, dan nilai sosial makan. Pola

konsumsi makan masyarakat terdiri dari makanan pokok yaitu nasi jagung dan hidangan pelengkap berupa lauk pauk dan sayur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makan masyarakat adalah faktor geografis, faktor budaya, faktor pengetahuan ibu rumah tangga, dan faktor pendapatan, dan pekerjaan keluarga.

(Margareta dan Purwidiani, 2014) Menurut Mufidah (2012), Fastfood menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat perkotaan yang sibuk dengan aktifitasnya sehingga tidak sempat memasak dan hampir tidak memiliki waktu untuk makan dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Dengan segala kemudahan serta fasilitas yang ada di dalam mall apalagi dengan kehadiran foodcourt sepertinya bisa mengisi kehidupan mereka yang menginginkan sesuatu yang serba cepat, instan dan lengkap. Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, saat makan cenderung dilakukan di rumah, di mana makanan yang disajikan merupakan hasil dari olahan sendiri (ibu). Pola konsumsi pada keluarga di Surabaya disebabkan faktor lingkungan; baik itu dari tingkat pendapatan, pendidikan, pengalaman, status sosial serta dari adanya sikap gengsi agar kedudukannya di dalam masyarakat bisa disejajarkan dengan yang lainnya.

### 3. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (2015) paling tidak terdapat empat penyebab ketimpangan, yaitu :

- a) Ketimpangan peluang. Nasib anak dari keluarga miskin terpengaruh oleh beberapa hal utama, yaitu tempat mereka lahir atau pendidikan orang tua mereka. Awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya. Setidaknya sepertiga ketimpangan diakibatkan faktor faktor di luar kendali seseorang individu.
- b) Ketimpangan pasar kerja. Pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
- c) Konsentrasi kekayaan. Kaum elit memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan di masa depan.
- d) Ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Saat terjadi goncang-an, masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak, menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk adalah :

- a) Memperbaiki layanan umum. Kunci bagi generasi berikut terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, camat, dan kabupaten, karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana bagi semua masyarakat.
- b) Memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan.
- c) Menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja.
- d) Menyediakan lapangan kerja yang lebih baik.
- e) Menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan.
- f) Meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan.

Dukungan masyarakat cukup kuat untuk adanya kebijakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Lebih dari setengah responden survei berpendapat kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali seseorang, misalnya latar belakang mereka atau pengalaman buruk. Hampir setengah dari seluruh responden mendukung program perlindungan sosial sebagai tindakan kebijakan yang penting. Penelitian Taryono dan Ekwarso (2012) menunjukkan hasil perhitungan indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat pada beberapa daerah di wilayah Riau Pesisir ketimpangan-nya dalam kategori sedang.

Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketidakadaan makanan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kurang-an. kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Subtansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. masalah kesenjangan adalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial. masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan, (Syawie, 2011).

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa Kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah- tengah masyarakat. (Purwanto, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada

kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan (Rusdarti dan Sebayang, 2013).

#### 4. Pertumbuhan

Ekonomi Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya harus disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Terdapat 3 pendekatan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. (Prishardoyo, 2008). Selanjutnya agar terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Soesilowati (2008) berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan, karena jika suatu kenaikan pendapatan nyata yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka akan terjadi kemunduran ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Meningkatnya konsumsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengalami kenaikan. Demikian juga dengan perkembangan investasi yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun naik dan sebaliknya.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah juga turut memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Shandra, 2012). Dari ketiga faktor tersebut konsumsi masih memegang peranan besar terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan investasi swasta peranannya masih relative lebih besar daripada investasi pemerintah

Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja melainkan juga harus berkualitas. Dengan demikian, sasaran dan target-target pembangunan menjadi tidak hanya sekedar untuk peningkatan pendapatan, melainkan juga harus mampu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa faktor pendorong utama pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas antara lain investasi human capital yang cukup dan berkelanjutan serta penguasaan penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada kesinergian antara peran dan potensi modal sosial yang dimiliki. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, adanya transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan (*vicious circle*) menjadi mampu menuju masyarakat yang “lebih maju”. (Prasetyo, 2008).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. (Barika, 2012).

#### 5. Gini Ratio (Koefisien Gini)

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi salah satunya cara yang digunakan adalah *Gini Ratio* (Koefisien Gini). Koefisien Gini mengukur ketimpangan di seluruh masyarakat daripada hanya membandingkan berbagai kelompok pendapatan. Jika semua pendapatan pergi ke satu orang (ketimpangan maksimum) dan semua orang tidak mendapat apa-apa, koefisien Gini akan sama dengan 1. Jika pendapatan dibagi sama rata, dan semua orang mendapatkan sama persis, Gini akan sama dengan 0. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin setara masyarakat.

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Koefisien Gini akan berubah tergantung pada apa yang diukur. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

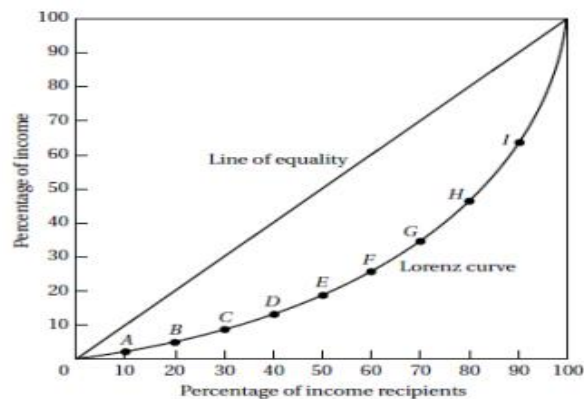
- 1)  $G < 0,3$  → ketimpangan rendah
- 2)  $0,3 \leq G \leq 0,5$  → ketimpangan sedang
- 3)  $G > 0,5$  → ketimpangan tinggi

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan suatu ketimpangan sempurna, yang berarti satu orang dalam suatu populasi menguasai semua pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa.

Ide dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Untuk menghitung Indeks Gini dibutuhkan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk Indeks Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (Gambar 3 – Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

**Gambar 3. Kurva Lorenz**



Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

$f_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{Ci}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{Ci-1}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i - 1)

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pada level Provinsi dan Nasional.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data dengan menggunakan rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

$f_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{Ci}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{Ci-1}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Dari hasil olah data, diperoleh Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua 2017 - 2021**

Tahun	2017		2018		2019		2020		2021	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
<b>Tingkat Ketimpangan</b>	0.397	0.398	0.369	0.398	0,394	0.391	0.392	0.395	0.397	0.396
<b>Gini Ratio Perkotaan</b>	0.322	0.302	0.312	0.294	0.297	0.288	0,296	0.291	0.301	0.307
<b>Gini Ratio Perdesaan</b>	0.395	0.395	0.384	0.416	0.409	0.41	0.414	0.416	0.422	0.419
<b>Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Prov. Papua</b>	14.71		15.55		15.35		15.62		15.74	
<b>Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan</b>	20.3		20.74		21.63		21.92		21.65	
<b>Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan</b>	15.00		16.00		15.37		15.11		15.32	

Sumber : Data BPS diolah, 2022

## 2. Pembahasan Penelitian

### a. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua

Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,397. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,399. Sementara itu jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,390, *Gini Ratio* Maret 2017 naik sebesar 0,007 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,322 naik dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,318 dan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,312. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,395 naik dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,392 dan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,383. Pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 14,71 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,30 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2017 yang sebesar 0,398. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2017 yang sebesar 0,399 turun sebesar 0,015 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,312, naik dibanding *Gini Ratio* September 2017 yang sebesar 0,302 dan turun jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2017 yang sebesar 0,322. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,384, turun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2017 yang sebesar 0,407 dan September 2017 yang sebesar 0,395. Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,55 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,74 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 16,00 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,394. Angka ini menurun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,398. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio*



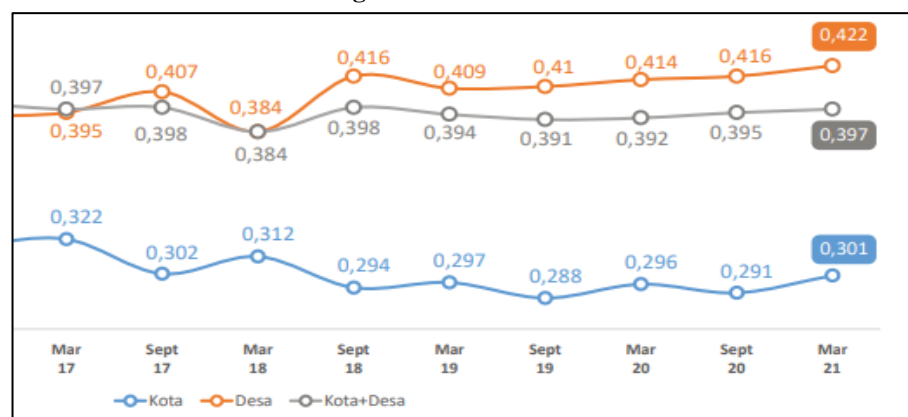
Maret 2018 yang sebesar 0,369 naik sebesar 0,025 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,297, naik dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,294 dan turun jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,312. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,409, naik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,384 dan turun jika dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,416. Pada Maret 2019, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,35 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,63 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,37 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,392. Angka ini meningkat sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2019 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2019 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,002 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,296, naik dibanding *Gini Ratio* September 2019 yang sebesar 0,288 dan juga turun jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2019 yang sebesar 0,297. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,414, naik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2019 yang sebesar 0,410 dan naik jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2019 yang sebesar 0,409. Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,62 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,92 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,11 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,397. Angka ini meningkat sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,395. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,392 naik sebesar 0,005 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,301, naik dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,291 dan juga naik jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,296. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,422, naik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,416 dan naik pula bila dibanding *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,414. Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah penduduk Provinsi Papua sebesar 15,74 persen. Artinya pengeluaran penduduk di Papua berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,65 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,32 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

#### b. Perkembangan *Gini Ratio*

Gambar 4. Perkembangan *Gini Ratio* Maret 2017 – Maret 2021



Sumber : Data BPS diolah, 2022

Secara umum, nilai *Gini Ratio* Provinsi Papua selama periode Maret 2017 hingga Maret 2021 mengalami *trend series* yang menurun. Namun pada September 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dan cenderung stagnan hingga kondisi akhir Maret 2021. Pada Maret 2021, *Gini Ratio* Provinsi Papua mencapai 0,397.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 0,301 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni 0,010 poin dibandingkan September

2020 yang sebesar 0,291 dan menurun juga meningkat 0,005 poin dari Maret 2020 yang sebesar 0,296. Untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,422, naik 0,006 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 0,416 dan naik sebesar 0,008 poin dari Maret 2020 yang sebesar 0,414.

**c. Perkembangan Distribusi Pengeluaran**

**1) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2016 - Maret 2017**

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Provinsi Papua adalah sebesar 14,71 persen yang berarti Provinsi Papua berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2017 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 15,15 persen. Namun, meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 14,36 persen.

**2) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2017 - Maret 2018**

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,55 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2018 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 15,18 persen dan naik pula jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 14,71 persen.

**3) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2018 - Maret 2019**

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,35 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2019 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 14,77 persen dan turun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 15,55 persen.

**4) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2019 - Maret 2020**

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,62 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2020 ini turun 0,12 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 15,74 persen; dan naik 0,27 persen jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 15,35 persen.

**5) Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2020 - Maret 2021**

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,74 persen yang berarti ada pada

kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2021 ini naik 0,02 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 15,72 persen; dan naik 0,12 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 15,62 persen.

## KESIMPULAN

Bedasarkan hasil analisis dapat kesimpulan bahwa Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Papua yang diukur menggunakan ini *Gini Ratio* selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0.398.

Untuk *Gini Ratio* Perkotaan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,322 dan *Gini Ratio* Perdesaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,422. Untuk Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 21,65 dan Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16,00.

Secara umum, nilai *Gini Ratio* Provinsi Papua selama periode Maret 2017 hingga Maret 2018 mengalami trend series yang menurun. Namun pada September 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dan cenderung stagnan hingga kondisi akhir Maret 2021. Pada Maret 2021, *Gini Ratio* Provinsi Papua mencapai 0,397.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manik, Fitri R. (2009), "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dengan Kabupaten Simalungun", Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Myrdal, G. (1957), *Economic Theory and Under-development Regions*, London.
- Margareta Dwi, dan Niken Purwidiani, 2014. Kajian tentang pola konsumsi utama masyarakat Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura. E-jurnal Boga, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2014. Hlm. 86-95.
- Mufidah Nur Lailatul, 2012. Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan (Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt oleh Keluarga). *Jurnal BioKultur*, Vol.I/No.2/Julii- Desember 2012, hlm. 157-178. Prasetyo, Eko P., 2008.
- The Quality Of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 18-31.
- Prishardoyo, Bambang, 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-200, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 1-8.
- Purwanto Erwan Agus, 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3 Maret 2007 (295-324)
- Rusdarti dan Sebayang Karolina Lesta. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.
- Shandra, Yosi, 2012. Konsumsi Dan Investasi Serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, April 2012
- Soesilowati, ETTY, 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan Yang Ditempuhnya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 9-17.
- Taryono dan Ekwarso, H., 2012. Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II No. 5*, Maret 2012.
- Taryono dan Syapsan. 2011. Dampak Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Skim Penelitian Laboratorium LPPM Universitas Riau*.
- Wida R Erlyna, Heru Irianto, dan Choirul Anam, 2015. Kajian identifikasi pangan pokok berbasis kearifan lokal pada rumah tangga pra sejahtera di Jawa Tengah. *Jurnal Agriekonomika*, Volume 4, Nomor 1 April, 2015 ISSN 2301-9948 -e ISSN 2407-6260.